

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan daerah Sulawesi Utara dapat diuraikan berdasarkan rekomendasi kajian sinergitas dan keterkaitan unsur perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini menjelaskan tentang beberapa isu strategis terkait dengan justifikasi rencana RPJMD Tahun 2010-2015.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Sosial Budaya

4.1.1.1. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan, meliputi:

1. Rata-rata lama sekolah relatif belum baik, walaupun secara nasional menduduki peringkat yang tinggi.
2. Kualitas pelayanan pendidikan dan distribusi tenaga guru belum merata terutama di daerah-daerah kepulauan.
3. Pendidikan seks termasuk HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya belum terakomodasi secara baik dalam kurikulum sekolah.
4. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah belum terlaksana dengan baik.
5. Akses pendidikan dasar terutama di daerah terpencil masih sulit.
6. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI belum berjalan.
7. Anak usia sekolah belum semua mengikuti wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
8. Masyarakat buta aksara masih ada.
9. Kondisi geografis kepulauan sehingga memiliki penyebaran penduduk yang kurang merata.
10. Kurikulum pada institusi pendidikan belum memberi bobot yang besar pada ilmu pengetahuan terapan.

4.1.1.2. Kesehatan

Permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan, meliputi:

1. Prevalensi penyakit menular di antaranya malaria, TBC, diare, dan DBD masih tinggi.
2. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih tinggi.
3. Kecenderungan meningkatnya prevalensi HIV/AIDS.
4. Kuantitas tenaga, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusinya yang belum merata terutama di daerah kepulauan.
5. Kasus balita gizi kurang masih ada.
6. Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi Minimum 2100 kkal/kapita/hari masih ada.
7. Biaya kesehatan meningkat secara signifikan sehingga menyulitkan masyarakat "hampir miskin" yang tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik.

8. Alokasi Jamkesmas sering belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak tidak memperolehnya, sebaliknya masyarakat yang tidak berhak mendapatkannya.
9. Keengganan di kalangan penyedia jasa kesehatan untuk melayani masyarakat miskin dan hampir miskin masih ada.
10. Kalangan penyedia jasa kesehatan yang mengharuskan uang jaminan terlebih dahulu sebelum melayani pasien masih banyak.
11. Minat tenaga medis, khusus tenaga ahli untuk ditempatkan di daerah-daerah kecil atau terpencil masih kurang.
12. Berbagai jenis penyakit baru muncul sebagai akibat perubahan gaya hidup dan pencemaran lingkungan makin meningkat.
13. Kesadaran akan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat terutama di kalangan berpendidikan rendah, miskin, dan menempati daerah kumuh masih rendah.

4.1.1.3. Kebudayaan

Permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan, meliputi:

1. Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.
2. Paguyuban-paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan daerah dan melakukan penyajian kebudayaan lokal secara rutin masih sangat minim.

4.1.1.4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pengangguran, meliputi:

1. Kemajuan teknologi akan menurunkan kebutuhan akan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran.
2. Penggunaan teknologi yang lebih tinggi membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, sedangkan perkembangan penguasaan keterampilan oleh tenaga kerja masih relatif lambat.
3. Porsi penduduk berusia lanjut yang bertambah akan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
4. Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi semakin meningkat sehingga dapat mengancam kesempatan tenaga kerja lokal dan menimbulkan pengangguran.
5. Tingkat kelahiran pada kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin masih tinggi.
6. Porsi penduduk berusia lanjut sebagai akibat keberhasilan mengendalikan tingkat kelahiran meningkat, sehingga membutuhkan jaminan sosial yang lebih besar.
7. Angka pengangguran masih relatif tinggi.
8. Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah.
9. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.
10. Pengangguran sukarela masih sering terjadi.

11. Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.
12. Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.

4.1.1.5. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan yang berkaitan dengan pemuda dan olahraga meliputi:

1. Sarana dan prasarana olahraga belum tersedia secara memadai.
2. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.
3. Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.

4.1.1.6. Sosial

Permasalahan yang berkaitan dengan sosial, meliputi:

1. Penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain) masih terbatas.
2. Penanganan lanjut usia masih terbatas.
3. Keadilan untuk semua di mana masih terjadi ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pelayanan publik belum tercipta.
4. Fasilitas penampungan (*shelter*) untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih terbatas.

4.1.1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil, meliputi:

1. *Database* kependudukan yang masih sangat lemah sehingga data kependudukan belum menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Situasi ini ditunjukkan oleh masih banyak kartu tanda penduduk (KTP) ganda namun masih banyak penduduk yang belum terdaftar.
2. Diskriminasi baik berdasarkan status sosial maupun etnis dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan catatan sipil masih terjadi.
3. Migrasi penduduk dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi meningkat.
4. Tingkat kelahiran pada kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin masih tinggi.
5. Kelahiran di luar nikah sebagai akibat pergeseran nilai budaya terkait arus globalisasi makin meningkat.
6. Porsi penduduk berusia lanjut meningkat sebagai akibat keberhasilan mengendalikan tingkat kelahiran sehingga membutuhkan jaminan sosial yang lebih besar.
7. *Database* kependudukan masih lemah sehingga masih menimbulkan kendala dalam menetapkan target pembangunan pemerintah. Hal ini menjadi kendala dalam pencegahan, pemberantasan kejahatan dan terorisme.

4.1.1.8. Pemberdayaan Perempuan

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan gender, meliputi:

1. Anggaran yang berhubungan dengan gender relatif belum memadai.
2. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas.
3. Masih sering terjadi perdagangan perempuan (*women-trafficking*) dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kualitas hidup perempuan masih harus ditingkatkan mengingat peran mereka sangat sentral dalam pembangunan.
5. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sangat penting untuk diperhatikan.
6. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan masih rendah padahal mereka lebih membawa aspirasi masyarakat yang terkait dengan kesejahteraan.
7. Perlindungan anak dan pemenuhan hak mereka masih harus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang.

4.1.1.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:

1. Usaha penanganan desa tertinggal belum dilakukan secara optimal.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perdesaan di antaranya air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian pada beberapa daerah relatif sangat terbatas.

4.1.1.10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, meliputi:

1. Ego sektoral masih terjadi.
2. Program-program pemerintah belum tersosialisasi secara baik.
3. Penggunaan *e-government* masih rendah.
4. *Data base* pemerintah daerah relatif belum memadai.
5. Arus informasi dan komunikasi masih lemah.
6. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah.
7. Aplikasi *e-Government* yang *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Customers* belum tersedia.
8. Infrastruktur dan aplikasi dasar belum tersedia.

4.1.1.11. Pemerintahan Umum dan Kearsipan

Permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan umum dan kearsipan, meliputi:

1. Kondisi Sulawesi Utara yang merupakan provinsi kepulauan membawa masalah tersendiri dalam upaya mempercepat respon pemerintah dan pelayanan masyarakat terutama di pulau-pulau terpencil.
2. Pelayanan aparatur yang banyak belum sesuai dengan harapan masyarakat dan persyaratan pelayanan minimum.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan aparatur serta untuk mengevaluasi kinerja mereka.
4. Keputusan yang diambil masih banyak yang belum mempertimbangkan dampak terhadap daya pikul dari mereka yang terkena dampak dari keputusan serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap perekonomian dan kesejahteraan secara luas.
5. Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih ada yang dilakukan oknum-oknum aparat sehingga menurunkan kualitas pelayanan serta rasa keadilan.

6. Kabupaten/kota masih banyak yang mendapat opini *Disclaimer* maupun *Adverse* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan mereka yang mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
7. *Clean and good government* belum berjalan sebagaimana seharusnya.
8. Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih relatif rendah.
9. Pemanfaatan Kantor Arsip belum dilaksanakan secara optimal.

4.1.2. Ekonomi

4.1.2.1. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Permasalahan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan perkebunan, meliputi:

1. Kemauan dan kemampuan petani masih kurang untuk menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju.
2. Irigasi masih kurang untuk mengatur ketersediaan dan penyaluran air untuk pertanian dan perkebunan.
3. Permukiman dan aktivitas ekonomi bertambah yang mempersempit lahan untuk pertanian.
4. Ketergantungan pada pupuk anorganik dan pestisida masih tinggi sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah.
5. Ketergantungan petani yang cukup tinggi terhadap program bantuan pemerintah sehingga kurang memiliki kemandirian dan daya juang yang tinggi.
6. Minat generasi muda Sulawesi Utara semakin berkurang untuk terjun dalam usaha pertanian, peternakan dan perkebunan.
7. Pengetahuan dan kemauan masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan limbah-limbah hasil pertanian, peternakan dan perkebunan untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah.
8. Data luas lahan dan jumlah produksi pertanian dan perkebunan masih belum akurat.
9. Alih fungsi atau konversi lahan pertanian dan perkebunan masih banyak yang tidak terdata.
10. Ketersediaan serta akses petani dan peternak atas saprodi masih belum memadai.
11. Modal di kalangan petani dan peternak masih terbatas.
12. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
13. Animo masyarakat, terutama kaum muda, untuk menjadi peternak dan petani profesional cenderung menurun.
14. Peremajaan tanaman perkebunan belum dilakukan secara optimal sehingga kebanyakan tanaman-tanaman tersebut berumur tua sehingga dapat mempengaruhi produktivitas hasil perkebunan di masa mendatang.
15. Penyakit tanaman perkebunan belum tertanggulangi secara baik.
16. Animo petani untuk beternak masih kurang dan hama penyakit ternak relatif tinggi.
17. Produksi daging masih rendah untuk memenuhi kebutuhan lokal.
18. Industri yang mendukung pengelolaan produk turunan dari komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih terbatas.
19. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan (*food security*).
20. Program-program penunjang ketahanan dan keamanan pangan masih kurang.
21. Hasil-hasil penelitian di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan masih kurang.

22. Kesejahteraan penyuluh masih kurang.
23. Penetapan klaster komoditas unggulan pertanian peternakan dan perkebunan belum optimal.
24. Pelaksanaan program-program yang menjamin ketersediaan pangan, dan papan secara berkelanjutan belum optimal.
25. Akses pemasaran hasil-hasil pertanian dan perikanan masih kurang.
26. Pengetahuan tentang pengelolaan agribisnis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
27. Intensifikasi penyuluhan pertanian masih kurang.

4.1.2.2. Kehutanan

Permasalahan yang berkaitan dengan kehutanan, meliputi:

1. Alih fungsi kawasan hutan masih terjadi untuk kepentingan lain yang dilakukan secara ilegal.
2. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim sekitar hutan masih kurang.
3. Perambahan hutan secara ilegal (*Illegal logging*) masih sering terjadi.
4. Ketersediaan sumber air berkurang karena erosi yang merupakan dampak perusakan hutan dan perubahan iklim yang tidak menentu.
5. Penebangan hutan secara tidak terencana dan kadangkala ilegal yang menyebabkan berkurangnya areal dan produksi hutan.
6. Penegakan hukum yang masih lemah berkaitan dengan pengamanan hutan. Selain itu, penegakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang melibatkan adat, organisasi profesi, institusi akademik, dan instansi teknis yang mengawinkan kekuatan kearifan lokal dan teknologi terkini, masih sangat minim dilakukan.
7. Usaha pemulihan cadangan sumber daya hutan dan yang terkait hutan (hutan, tanah, dan air) belum konsisten.
8. Permukiman dan aktivitas ekonomi bertambah di kawasan lindung (hutan).
9. Pemanfaatan sumber daya hutan yang berorientasi pada keseimbangan ekologi, pembangunan ekonomi, dan kompatibilitas sosial budaya belum optimal.

4.1.2.3. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Perbaikan dan pembenahan kawasan konservasi masih kurang untuk menjaga kelestariannya serta melakukan berbagai upaya yang diperlukan agar kawasan-kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi dunia.
2. Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) masih sering terjadi.
3. *Fishing ground* semakin jauh dan terbatas.
4. Penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) yang lebih maju masih sangat terbatas.
5. Pemanfaatan daerah-daerah pesisir untuk kegiatan budidaya belum optimal.
6. Bibit unggul untuk budidaya perikanan darat dan laut masih sulit diperoleh.
7. Akses nelayan terhadap sumber-sumber permodalan masih sulit.
8. Keluhan nelayan mengenai pungutan-pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu di laut masih terjadi.
9. Produk turunan dari komoditas perikanan dan kelautan yang dihasilkan oleh kegiatan manufaktur di Sulawesi Utara masih terbatas.

10. *Illegal fishing* dan pungutan liar di laut masih terjadi yang menyebabkan penurunan produksi perikanan tangkap.
11. Cara penangkapan ikan yang merusak kehidupan laut dan mengancam ketersediaan sumber-sumber ekonomis laut di masa mendatang.
12. Pencemaran laut dan sungai yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan kegiatan usaha sehingga mengurangi jumlah ikan dan fauna lainnya serta menyebabkan berbagai penyakit pada manusia yang mengkonsumsinya.
13. Klaim perbatasan laut dengan negara-negara tetangga yang menimbulkan ketidaknyamanan nelayan untuk melaut lebih jauh.
14. Minat nelayan masih rendah untuk pengembangan budidaya pesisir.
15. Perubahan harga BBM sering terjadi yang menyebabkan masalah bagi modal kerja nelayan.
16. Modal Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan masih terbatas.
17. Tenaga Penyuluh Perikanan masih terbatas.
18. Kawasan Konservasi Laut Daerah belum dikelola secara optimal.
19. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal.

4.1.2.4. Perdagangan

Permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan, meliputi:

1. Sarana dan prasarana kegiatan distribusi yang meliputi pergudangan, pengemasan, dan transportasi untuk bahan pokok serta bahan strategis untuk perdagangan domestik maupun internasional belum memadai.
2. Akses pasar, baik domestik maupun internasional, dari komoditas-komoditas unggulan relatif masih terbatas.
3. Regulasi yang menghambat kegiatan perdagangan antara lain pungutan kabupaten/kota terhadap kegiatan transportasi masih ada.
4. Promosi komoditas unggulan masih belum optimal.
5. Data mengenai kegiatan perdagangan masih belum akurat.
6. Perdagangan lintas batas belum diatur.
7. Kerjasama dan sosialisasi sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis belum ada.
8. Peran sektor swasta dan asosiasi-asosiasi bisnis dalam menunjang perdagangan belum optimal.
9. Badan kerjasama internasional bidang perdagangan belum ada.
10. Kerjasama sub-regional yang menunjang kegiatan perdagangan antar negara belum optimal.
11. Kerjasama badan-badan kerjasama antara daerah belum optimal.
12. Pemanfaatan Sekretariat *Coral Triangle Initiative* (CTI) sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara yang memiliki wilayah laut belum optimal.
13. Barang dan jasa yang dihasilkan di Sulawesi Utara masih jauh dari kebutuhan konsumen yang mengakibatkan posisi sebagai *net-importer*.
14. Infrastruktur di daerah kepulauan masih terbatas.
15. Pungutan liar dalam pengangkutan barang masih ada sehingga menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang pada gilirannya terjadi kenaikan harga barang.

4.1.2.5. Perindustrian

Permasalahan yang berkaitan dengan perindustrian, meliputi:

1. Agroindustri yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas-komoditas unggulan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.
2. Teknologi pasca panen termasuk pengemasan belum dimanfaatkan secara memadai.
3. Produk turunan komoditas-komoditas unggulan terutama kelapa masih terbatas.
4. Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif.
5. Pemilikan tanah untuk lahan industri masih bermasalah.
6. Investor belum ada yang serius untuk membuka suatu kawasan industri pengolahan
7. Danapemerintah daerah masih terbatas untuk pembebasan tanah maupun pembangunan kawasan industri.
8. Pungutan liar saat pengangkutan bahan baku dan barang jadi serta dalam operasi perusahaan masih ada.
9. Pengurusan izin yang dihadapi pengusaha masih berbelit.
10. Pasokan energi listrik sehingga perusahaan menanggung biaya energi yang besar masih terbatas.
11. Jumlah pabrik pengolahan untuk memproduksi produk turunan komoditas unggulan, seperti kelapa, pala, cengkeh, jagung, dan hasil laut mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang dinikmati atas hasil komoditas-komoditas unggulannya terbatas.

4.1.2.6. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), meliputi:

1. Jumlah koperasi yang tidak aktif masih banyak.
2. Sebagian besar koperasi memiliki kelemahan pada faktor manajerial dan permodalan.
3. Kepercayaan perbankan masih rendah terhadap UKM.
4. Kemampuan UMKM dalam penyusunan proposal bisnis (*bussiness proposal*) masih terbatas.
5. Kebanyakan usaha mikro dan kecil memiliki ketergantungan terhadap pendampingan fasilitator.
6. Mental kewirausahaan di sebagian UMKM masih lemahnya.
7. Peran dan fungsi perusahaan daerah belum optimal
8. Promosi produk-produk UMKM baik didalam maupun diluar negeri masih kurang.
9. Minimnya penguasaan teknologi oleh koperasi dan UMKM sehingga produk yg dihasilkan kualitas dan kuantitasnya masih terbatas, termasuk kemasan produk-produk UMKM yang tidak memiliki daya saing di pasaran.
10. Kegiatan kemitraan seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil, dan penyumberluaran (*outsourcing*) masih kurang.
11. Minat wiraswasta muda lokal untuk berinvestasi dibidang UMKM masih kurang.
12. Fungsi kelembagaan koperasi belum optimal.
13. Kegiatan dan minat untuk mengembangkan/mendorong ekonomi kreatif lokal masih kurang.
14. Usaha keras dari KUMKM untuk meningkatkan usahanya masih kurang.

15. Akses KUMKM masih sulit terutama usaha mikro dan kecil, terhadap modal serta lemahnya kemampuan manajerial dan pasar yang dapat dimasuki.
16. KUMKM masih tergantung pada bantuan pemerintah.
17. Penyalahgunaan KUMKM terhadap bantuan pemerintah dan swasta maupun kredit untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan usaha.
18. Pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu dalam program bantuan KUMKM masih ada.
19. Penyalahgunaan danakoperasi oleh pengurus masih ada.
20. Minat masyarakat menurun untuk membentuk koperasi secara serius. Kebanyakan koperasi dibentuk karena ada bantuan dari pemerintah.

4.1.2.7. Penanaman Modal/Investasi

Permasalahan yang berhubungan dengan penanaman modal daerah, meliputi:

1. Aturan yang menghambat kegiatan investasi dan operasional dunia usaha masih ada.
2. Perizinan satu pintu belum berjalan sebagaimana diharapkan dan belum merata di kabupaten/kota.
3. Promosi investasi belum dilakukan secara optimal.
4. Koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi masih kurangnya.
5. Insentif terhadap investor untuk menarik investasi masih belum memadai.
6. Kompleksitas dalam perizinan dan masih adanya perilaku oknum-oknum yang mempersulit perizinan.
7. Aturan yang tumpang tindih di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih ada.
8. Jenis pajak dan retribusi daerah masih banyak sehingga mengganggu keinginan berinvestasi.
9. Kekurangan dalam sarana dan prasarana dasar terutama listrik masih ada.
10. Gangguan saat investasi dilaksanakan terutama lemahnya undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia masih ada.

4.1.2.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Permasalahan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi:

1. Simpanan minyak bumi dan gas serta bahan tambang mineral Indonesia menyebabkan kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan dana perimbangan ke daerah menurun.
2. Tuntutan daerah yang kaya akan sumber daya alam untuk memperoleh dana bagi hasil yang lebih besar meningkat sehingga mengurangi dana ekualitas pemerintah pusat.
3. Ketidaksiapan SDM pemerintah untuk mengambil alih pemungutan atas pajak yang dialihkan pemerintah pusat ke daerah.
4. Jenis pajak dan retribusi yang dipungut masih banyak sehingga melemahkan pengawasan yang berujung pada kebocoran hasil pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, masyarakat dan kalangan usaha semakin terbebani.
5. Pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dapat dilihat dari belum tercapainya pemerintahan daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

4.1.2.9 Pertambangan dan Penggalian

Permasalahan yang berkaitan dengan pertambangan dan penggalian, meliputi:

1. Pembuangan limbah perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan keberadaan banyak penambang liar yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Keberadaan sumber daya pertambangan dan penggalian banyak berdekatan dengan daerah wisata.
3. Resistensi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tambang masih besar.
4. Ketergantungan Sulawesi Utara terhadap pengusaha dari daerah lain atau luar negeri untuk melakukan penambangan sehingga nilai tambah yang tertinggal sangat rendah.

4.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:

1. Fungsi intermediasi IPTEK dalam interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna belum optimal. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis IPTEK.
2. Topik serta arah penelitian dan pengembangan yang dilakukan lembaga pendidikan dan lembaga terkait seringkali kurang mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha lokal.
3. Para pengusaha belum sepenuhnya mempercayai kualitas hasil rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan Indonesia guna mendukung pengembangan teknologi dalam negeri.
4. Dana untuk penelitian dan pengembangan IPTEK yang bermutu secara berkelanjutan masih terbatas.
5. Sinergitas kebijakan IPTEK masih lemah, sehingga kegiatan IPTEK belum memberikan hasil yang signifikan.
6. Sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang mampu mendorong akselerasi budaya IPTEK yang kondusif masih terbatas.
7. SDM peneliti yang profesional dan kompeten untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih berkualitas masih terbatas.
8. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan penelitian yang lebih efektif dan efisien belum optimal.
9. Budaya IPTEK di kalangan masyarakat Sulawesi Utara masih terbatas, di mana masyarakat belum terbiasa mengapresiasi nilai-nilai IPTEK yang penalarannya bersifat objektif, rasional, maju, unggul, dan mandiri.

4.1.4. Infrastruktur Wilayah

4.1.4.1. Infrastruktur Ke-PU-an

Permasalahan yang dihadapi di bidang infrastruktur ke-PU-an, meliputi:

1. Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase, baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum tersedia secara memadai.
2. Permukiman penduduk atau perumahan di banyak tempat masih menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih, ketersediaan perumahan yang layak huni masih kurang.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan belum memadai.
4. Manajemen persampahan belum dilaksanakan secara baik terutama pada tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah di TPA belum mempertimbangkan

dampak terhadap lingkungan sekitar TPA serta sampah belum dimanfaatkan menjadi produk produktif seperti pupuk dan tenaga listrik.

4.1.4.2. Perhubungan

Permasalahan yang berkaitan dengan perhubungan, meliputi:

1. Sistem transportasi perkotaan belum tersedia secara memadai.
2. Pelabuhan laut dan udara belum tersedia secara memadai.
3. Ketersediaan daya listrik belum mencukupi untuk kepentingan rumah tangga dan dunia usaha yang ditandai masih seringnya terjadi pemadaman aliran listrik.
4. Fasilitas listrik belum tersedia di beberapa pulau di Sulawesi Utara.
5. Jumlah penerbangan domestik dan internasional yang masuk melalui Bandara dan pelabuhan Bitung masih kurang.
6. Peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan pembagian tugas dan fungsi stakeholder yang ada kurang sinkron.
7. Fasilitas serta penambahan sarana bantu navigasi Pelabuhan Samudra Bitung masih kurang.
8. Daya tampung parkir kapal laut masih terbatas.
9. Pelabuhan Bitung sebagai Internasional Hub-port belum terealisasi.
10. Akses dan jaringan pelayaran serta penerbangan internasional masih terbatas.
11. Infrastruktur transportasi laut, udara serta sarana prasarana jalan masih terbatas.
12. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas masih rendah.
13. Investasi yang telah dilakukan pada pembangunan sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan kurang efektif dan efisiensi.
14. Biaya pembangunan provinsi kepulauan untuk infrastruktur perhubungan, dan telekomunikasi menjadi mahal dan kurang memberi nilai tambah.
15. Meningkatnya harga tanah serta biaya-biaya lain mengakibatkan peningkatan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi.
16. Keterbatasan dana pemerintah daerah serta penggunaannya secara kurang bijaksana mengakibatkan alokasi dana bagi pembangunan termasuk pemeliharaan infrastruktur perhubungan menjadi kurang mendapat perhatian.

4.1.4.3. Energi

Permasalahan yang berkaitan dengan energi, meliputi:

1. Ketergantungan penyedia listrik terhadap penggunaan diesel yang memiliki biaya operasional yang relatif tinggi masih besar.
2. Pemanfaatan panas bumi dan tenaga air sebagai energi pembangkit listrik belum optimal.
3. Upaya serius untuk melihat kemungkinan penggunaan arus bawah laut sebagai pembangkit tenaga listrik belum ada.
4. Biaya investasi awal untuk menggunakan teknologi penghasil energi yang lain masih tinggi.
5. Kemauan dan upaya untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) dengan memanfaatkan tanaman lokal, seperti kelapa, aren, dan balaceae masih rendah.
6. Adanya kecenderungan penurunan produktivitas tanaman penghasil BBN.
7. Kemampuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membiayai investasi pembangkit listrik masih relatif rendah.

8. Pasokan daya listrik masih kurang.
9. Sumber pembangkit listrik belum banyak memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia, seperti panas bumi dan tenaga air.
10. Upaya serius untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) dengan memanfaatkan komoditi lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) belum ada.
11. Pengelolaan sumberdaya mineral belum dilakukan secara optimal sehingga belum memberikan dampak berarti bagi perekonomian.
12. Pengelolaan sumberdaya mineral belum memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.
13. Pemanfaatan energi baru terbarukan seperti biomassa, angin, arus laut, dan matahari belum optimal.

4.1.4.4. International Hub Port (IHP)

Permasalahan yang berkaitan dengan *International Hub Port*, meliputi:

1. *Lobby* yang kuat untuk mendapatkan dukungan serius dari pemerintah pusat untuk membangun IHP sebagai alternatif untuk IHP negara lain masih kurang.
2. Investasi IHP membutuhkan dana yang besar yang sulit dibiayai oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk meyakinkan pemerintah agar menjadi bagian dari konsorsium dengan perusahaan pelayaran besar di dunia untuk membangun IHP di Sulawesi Utara.
3. Komoditas Sulawesi Utara memiliki jumlah terbatas untuk memperoleh suatu skala keekonomian operasionalisasi IHP.

4.1.4.5. Air Bersih

Permasalahan yang berkaitan dengan air bersih, meliputi:

1. Pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke daerah aliran sungai yang mengakibatkan pencemaran sumber air bersih masih terjadi.
2. Penggunaan air tanah secara tidak efisien.
3. Perhatian pemerintah terhadap pendangkalan beberapa danau dan sungai yang merupakan sumber utama air bersih masih kurang.
4. Perusakan hutan yang merupakan sumber penyedia air baku.
5. Perubahan iklim yang tidak menentu serta pemanasan global yang memberi pengaruh terhadap ketersediaan air permukaan maupun dalam tanah.
6. Penggunaan air bawah tanah yang semakin meningkat, baik untuk keperluan industri maupun rumah tangga.
7. Pendangkalan danau dan sungai oleh limbah alamiah maupun limbah dari manusia.
8. Semua kabupaten/kota belum memiliki perusahaan air yang menjadi penyediaan kebutuhan air masyarakat dan kegiatan ekonomi. Selain itu, umumnya perusahaan air daerah belum dikelola dengan baik sehingga daya jangkau pelayanannya tidak luas.

4.1.5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi:

1. Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim (*climate change*) mengakibatkan perubahan ekstrim terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) masih pada tataran administratif belum menyentuh pada substansi AMDAL.
3. Perencanaan pembangunan yang dilakukan belum mengakomodasi secara memadai sebagai upaya menciptakan pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).
4. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program daerah belum terpadu.
5. Kajian hidup strategis untuk setiap dokumen perencanaan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi RTRW, RPJPD dan, RPJMD masih perlu dijaga konsistensinya.
6. Pola pertambangan yang merusak lingkungan.
7. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup masih rendah.
8. Permasalahan isu global warning belum sepenuhnya terinformasi.
9. Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) belum tersedia.
10. Peraturan Daerah PERDA yang berhubungan dengan perubahan iklim belum ada.
11. Pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim dan masih kurangnya peringatan dini.
12. Sosialisasi dan kampanye yang ada belum dilakukan secara merata di seluruh daerah.
13. Kerjasama internasional terkait perubahan iklim belum terlaksana.
14. Pemahaman dalam rangka pengembangan dan pemantapan kerjasama internasional terkait perubahan iklim masih kurang.
15. Peran IPTEK dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup yang menimbulkan permasalahan lingkungan belum optimal.
16. Kegiatan produksi dan kegiatan masyarakat lainnya masih menggunakan teknologi yang belum ramah lingkungan dan belum peduli dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan.
17. Banyak wilayahrawan bencana alam dan intensitas bencana alam yang semakin meningkat yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

4.1.6. Politik

Permasalahan yang berkaitan dengan politik dalam negeri, meliputi:

1. Kesadaran organisasi kemasyarakatan untuk registrasi masih rendah.
2. Organisasi kemasyarakatan yang ada sebagian belum tertib.
3. Tindakan deteksi dini terhadap pendatang yang bertujuan mengganggu ketentraman masih rendah.
4. Kesadaran dan wawasan politik masyarakat secara umum masih rendah.
5. Politik uang dalam pemilihan kepala daerah langsung maupun dalam keputusan-keputusan politik masih terjadi.
6. Kesadaran dan wawasan masyarakat terkait dengan *interdependency* dengan masyarakat internasional dan masyarakat ekonomi ASEAN secara umum masih rendah.
7. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal belum baik.
8. Hubungan eksekutif dan legislatif untuk menuju kemitraan yang menjamin keamanan dalam menjalankan roda pemerintahan masih banyak.
9. Peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi serta kurangnya akses partisipasi publik oleh masyarakat belum kuat.

4.1.7. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Permasalahan yang berkaitan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi:

1. Perbaikan integritas penegak hukum masih rendah di daerah sehingga ketidakadilan dalam penegakkan hukum yang dirasakan masyarakat menjadi sulit diperbaiki.
2. Anggota masyarakat masih banyak yang tidak memahami hukum dan HAM sehingga menjadi korban maupun pelanggar hukum.
3. Penegakan hukum masih tidak konsisten dan tebang pilih sehingga kurang memberi efek jera bagi para pelanggar hukum.

4.1.8. Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban, meliputi:

1. Meningkatnya eskalasi kegiatan kejahatan di Indonesia, baik kejahatan murni maupun kejahatan yang memanfaatkan kelompok agama dan golongan.
2. Adanya upaya menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain sehingga mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tindakan yang tegas dan konsisten oleh penegak hukum dalam menjaga ketertiban masih kurang.
4. Kebiasaan sebagian masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan yang mendorong terjadinya gangguan keamanan.
5. Luasnya daerah operasi dari institusi keamanan sehingga mengurangi kemampuan dalam merespon gangguan keamanan dan melakukan tindakan pencegahan.
6. Kehidupan yang tertib di kalangan masyarakat terutama dalam penggunaan fasilitas umum belum membudaya.
7. Migrasi penduduk yang semakin tinggi dengan membawa budaya masing-masing memiliki potensi munculnya pertikaian antar kelompok masyarakat sehingga mengganggu ketentraman.

4.1.9. Aparatur

Permasalahan yang berkaitan dengan aparatur, meliputi:

1. Proses seleksi PNS belum memasukkan pertimbangan integritas calon PNS.
2. Praktek KKN dalam penerimaan PNS sehingga mengurangi kualitas calon PNS yang diterima masih ada.
3. Ketidakesesuaian pekerjaan dengan aparatur yang melaksanakannya.
4. Secara umum, kualitas SDM aparatur masih relatif belum baik serta dibayangi oleh rendahnya kesejahteraan PNS.
5. Perilaku oknum-oknum tertentu yang mempersulit atau memperlambat proses pelayanan masyarakat.
6. Keengganan PNS untuk ditempatkan di daerah terpencil sehingga menciptakan kesenjangan dalam distribusi PNS.
7. Masalah dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) masih ada.
8. Penempatan PNS belum sesuai dengan latar belakang pendidikan/kompetensi.
9. Distribusi PNS belum merata sesuai dengan kebutuhan tiap satuan kerja.

4.1.10. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

4.1.10.1. Penataan Ruang

Permasalahan yang berhubungan dengan penataan ruang, meliputi:

1. Alih fungsi hutan secara ilegal masih sering terjadi.
2. Konversi lahan terutama konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman masih terjadi.
3. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) secara memadai belum dilakukan.
4. Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terkini belum dilakukan.
5. Ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW masih rendah.
6. Pengelolaan hutan yang tidak memiliki limitasi dalam suatu wilayah menjadi kendala dalam kaitannya dengan kemampuan daya dukung wilayah yang sangat terbatas.
7. Alokasi dana untuk perawatan secara optimal masih kurang.

4.1.10.2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Permasalahan yang berhubungan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), meliputi:

1. Upaya meyakinkan pemerintah pusat bahwa KEK layak ada belum optimal
2. Perlunya upaya keras dan intensif untuk mendapatkan investor dalam membiayai investasi KEK mengingat keterbatasan dana pemerintah.
3. Operasi KEK dapat menarik buruh-buruh migran dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat menimbulkan kompleksitas masalah sosial.
4. Kemampuan provinsi-provinsi sekitar untuk memasok bahan baku belum memadai dan berkelanjutan.

4.1.10.3. Pertanahan

Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan, meliputi:

1. Tanah yang belum disertifikasi masih banyak.
2. Sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda masih sering terjadi.

4.1.10.4. Wilayah Perbatasan

Pembangunan wilayah Perbatasan Antar Negara sebagai Beranda Depan NKRI, meliputi:

1. Penegakkan kedaulatan di laut belum optimal.
2. Kejahatan transnasional berdimensi maritim masih ada.
3. Aktivitas *illegal fishing*, barang, obat terlarang, dan senjata api masih ada.
4. Potensi konflik dengan negara tetangga terkait perbatasan negara masih ada.
5. Aksesibilitas terhadap lokasi terisolasi yang mengakibatkan sulit dijangkau oleh aparat hukum dan keamanan masih terbatas.
6. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di pulau-pulau perbatasan masih terbatas.
7. Personil dan peralatan pendukung aparat pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban masih terbatas.
8. Eksploitasi SDA di 11 pulau terluar yang umumnya rawan abrasi (kemungkinan tenggelamnya pulau) belum terkendali.
9. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam membangun wilayah perbatasan masih kurang.
10. Kapasitas Pemdadalam pengelolaan kawasan perbatasan masih terbatas.

11. Peraturan Pemerintah Daerah yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan belum ada.
12. Sarana prasarana sosial dasar antara lain air bersih, Kesehatan (RSD/Puskesmas/Pustu/PONED/POSYANDU), pendidikan (gedung sekolah, IT, Laboratorium Dasar, Fasilitas Olahraga, Fasilitas P3K) masih terbatas.
13. Potensi tempat mangkalnya teroris internasional akibat belum meratanya jumlah penduduk dan bahkan dari 11 pulau kecil terluar ada 3 yang tidak berpenghuni (Intata, Batubawaikang, Bongkil).
14. Mobilitas penduduk dengan segala implikasinya belum berkurang.
15. Masalah mengenai tapal batas antar daerah masih ada.
16. Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan relatif rendah.

4.1.10.5 Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, meliputi:

1. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan, baik di lingkup sektoral maupun lintas tingkatan pemerintahan.
2. Masih terbatasnya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang baik.
3. Masih lemahnya sinergi pembangunan antar kabupaten/kota terutama dalam menjamin konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah.
4. Masih lemahnya kualitas kajian-kajian yang dapat menunjang perencanaan pembangunan yang baik.
5. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
6. Belum terintegrasinya seluruh masterplan perencanaan sektoral di setiap tingkatan baik di kabupaten-kota maupun di provinsi.
7. Masih terbatasnya intensitas kerjasama antar pelaku pembangunan terutama pihak swasta dan masyarakat pada umumnya dalam membangun *public private partnership*.
8. Masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan dan mengintegrasikan kebijakan perencanaan di tingkat nasional ke dalam perencanaan tingkat daerah baik dalam skala sektoral maupun dalam skala kewilayahan.
9. Masih kurangnya upaya pengembangan kerjasama regional di tingkat provinsi-provinsi pulau Sulawesi termasuk dalam upaya sinkronisasi masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI)
10. Masih lemahnya sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi perencana dan peneliti di hampir semua tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari data dan informasi yang terkumpul, selanjutnya diangkat isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan daerah Sulawesi Utara dan diuraikan berdasarkan rekomendasi kajian sinergitas serta keterkaitan unsur perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dimana visi pembangunan menuju masyarakat yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan justifikasi dunia internasional, kebijakan

nasional, regional, dan diantaranya isu-isu strategis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi dan inovasi baru lainnya.

Tabel 4.1 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin	100	0,89
2	Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia	80	0,68
3	Memantapkan penerapan <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal	100	0,91
4	Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi	90	0,74
5	Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional dan lokal yang berbasis pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	70	0,76
6	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab	70	0,62
7	Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan	80	0,69
8	Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai bagian dari masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik	80	0,76
9	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara	70	0,59
10	Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional	80	0,66
11	Memantapkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah	100	0,82
12	Menyediakan infrastruktur publik yang memadai	90	0,74
13	Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim	100	0,83
14	Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak dan lanjut usia	90	0,68
15	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai)	100	0,84